



# **PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018**

## **TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

Disampaikan dalam Rapat Koordinasi LPSE Wilayah Sumatera  
Medan, 07 Agustus 2018

# AGENDA

1

Pokok Perubahan & Siklus Pengadaan

2

Pengaturan Baru

3

Perubahan Pengaturan

# POKOK PERUBAHAN & SIKLUS PENGADAAN

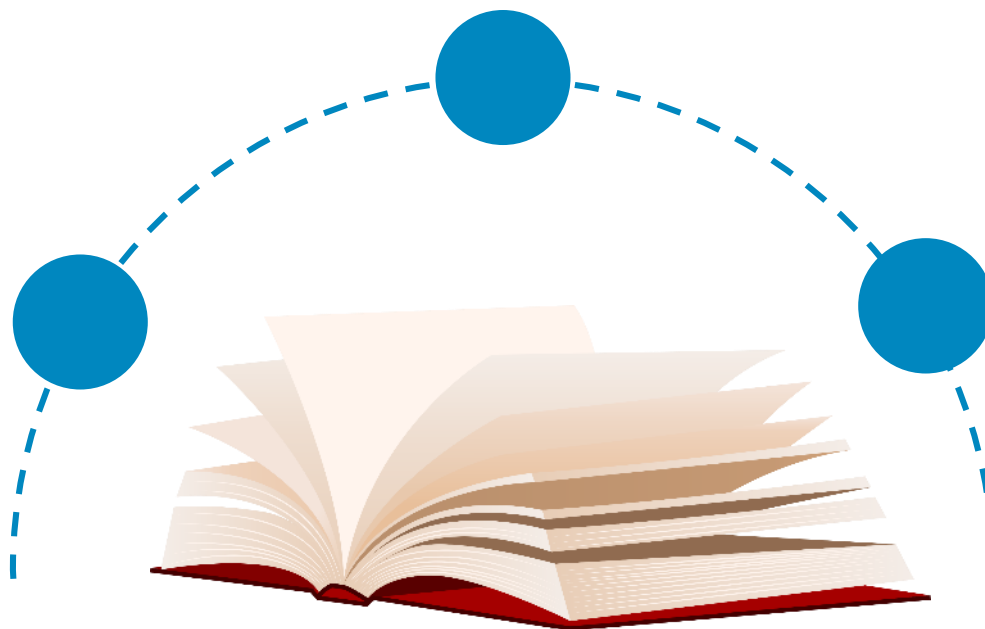
# POKOK PERUBAHAN

---

## STRUKTUR LEBIH SEDERHANA

### SIMPLIFIKASI

- HANYA MENGATUR HAL YANG BERSIFAT NORMATIF
- MENGHILANGKAN BAGIAN PENJELASAN
- STANDAR DAN PROSEDUR DIATUR DALAM PERATURAN LKPP DAN PERATURAN KEMENTERIAN SEKTORAL TERKAIT



### BEST PRACTICE

MENERAPKAN PRAKTEK-  
PRAKTEK TERBAIK DALAM  
MELAKSANAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA

# STUKTUR PERPRES NO 16/2018

15 BAB  
94 PASAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM

BAB II  
TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA  
PENGADAAN BARANG/JASA

BAB III  
PELAKU PENGADAAN  
BARANG/JASA

BAB IV  
PERENCANAAN  
PENGADAAN

BAB V  
PERSIAPAN PENGADAAN  
BARANG/JASA

BAB VI  
PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

BAB VII  
PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

BAB VIII  
PENGADAAN KHUSUS

- PENGADAAN BARANG/  
JASA DALAM RANGKA  
PENANGANAN KEADAAN  
DARURAT

- PENGADAAN  
BARANG/JASA DI  
LUAR NEGERI

- PENGECUALIAN

- PENELITIAN

- TENDER/SELEKSI  
INTERNASIONAL DAN  
DANA PLN/HLN

BAB IX  
USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI,  
DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN

- PERAN SERTA  
USAHA KECIL

- PENGGUNAAN  
PRODUK DALAM  
NEGERI

- PENGADAAN  
BERKELANJUTAN

BAB X  
PENGADAAN BARANG/JASA  
SECARA ELEKTRONIK

BAB XI  
SUMBER DAYA MANUSIA  
DAN KELEMBAGAAN

BAB XII  
PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI,  
DAN PELAYANAN HUKUM

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-  
LAIN

BAB XIV  
KETENTUAN  
PERALIHAN

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

# PERATURAN LEMBAGA



←→  
Perlem 7/2018 :  
Perencanaan Pengadaan

←→  
Perlem 8/2018 : Pedoman Swakelola  
Perlem 9/2018 : Pedoman Pbj Melalui Penyedia  
Perlem 10/2018 : Tender/Seleksi Internasional  
Perlem 12/2018 : PBJ Pengecualian  
Perlem 13/2018 : PBJ Penanganan Keadaan Darurat

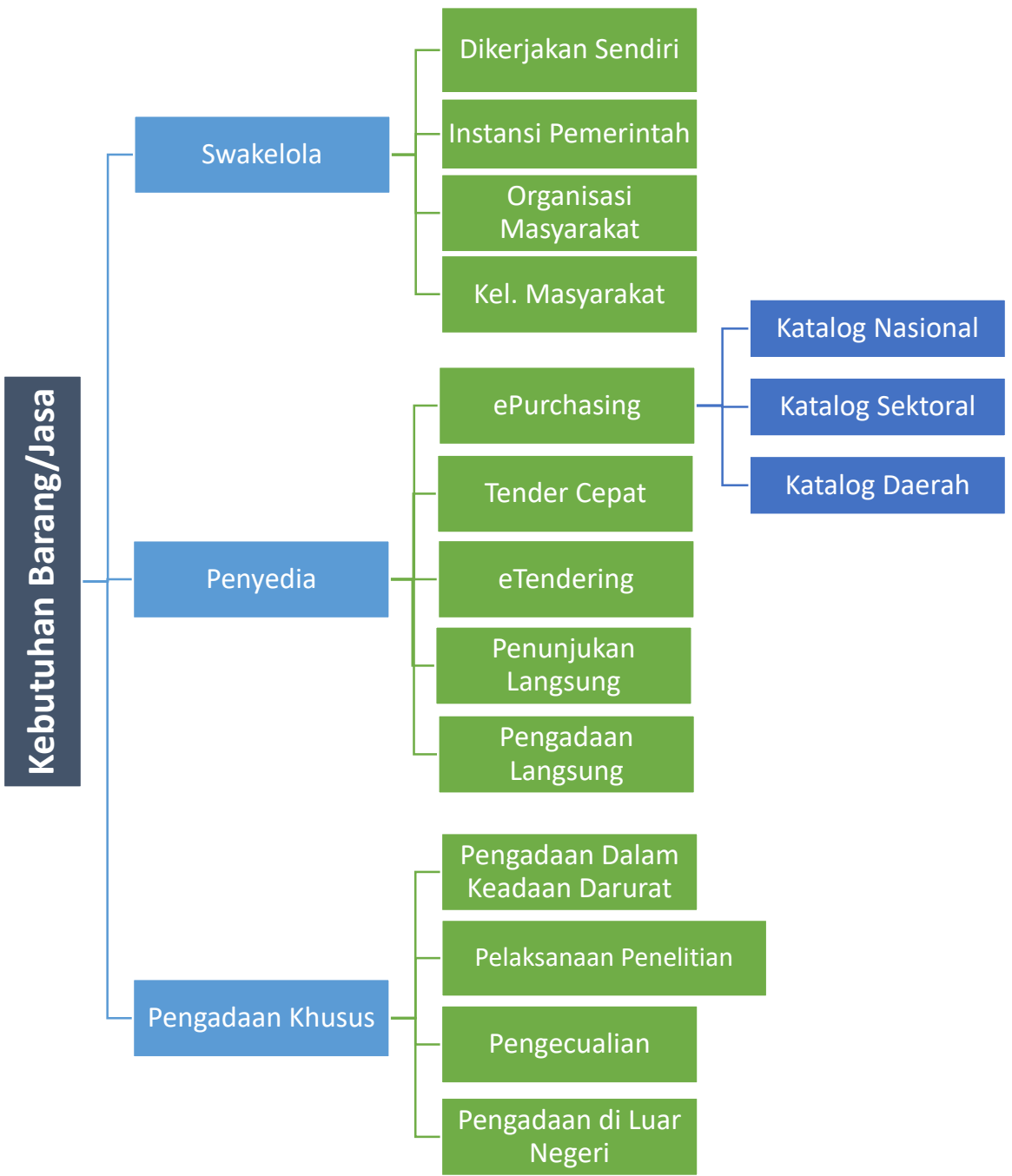


↑  
Perlem 11/2018 : Katalog Elektronik  
Perlem 14/2018 : UKPBJ  
Perlem 15/2018 : Pelaku Pengadaan  
Perlem 16/2018 : Agen Pengadaan

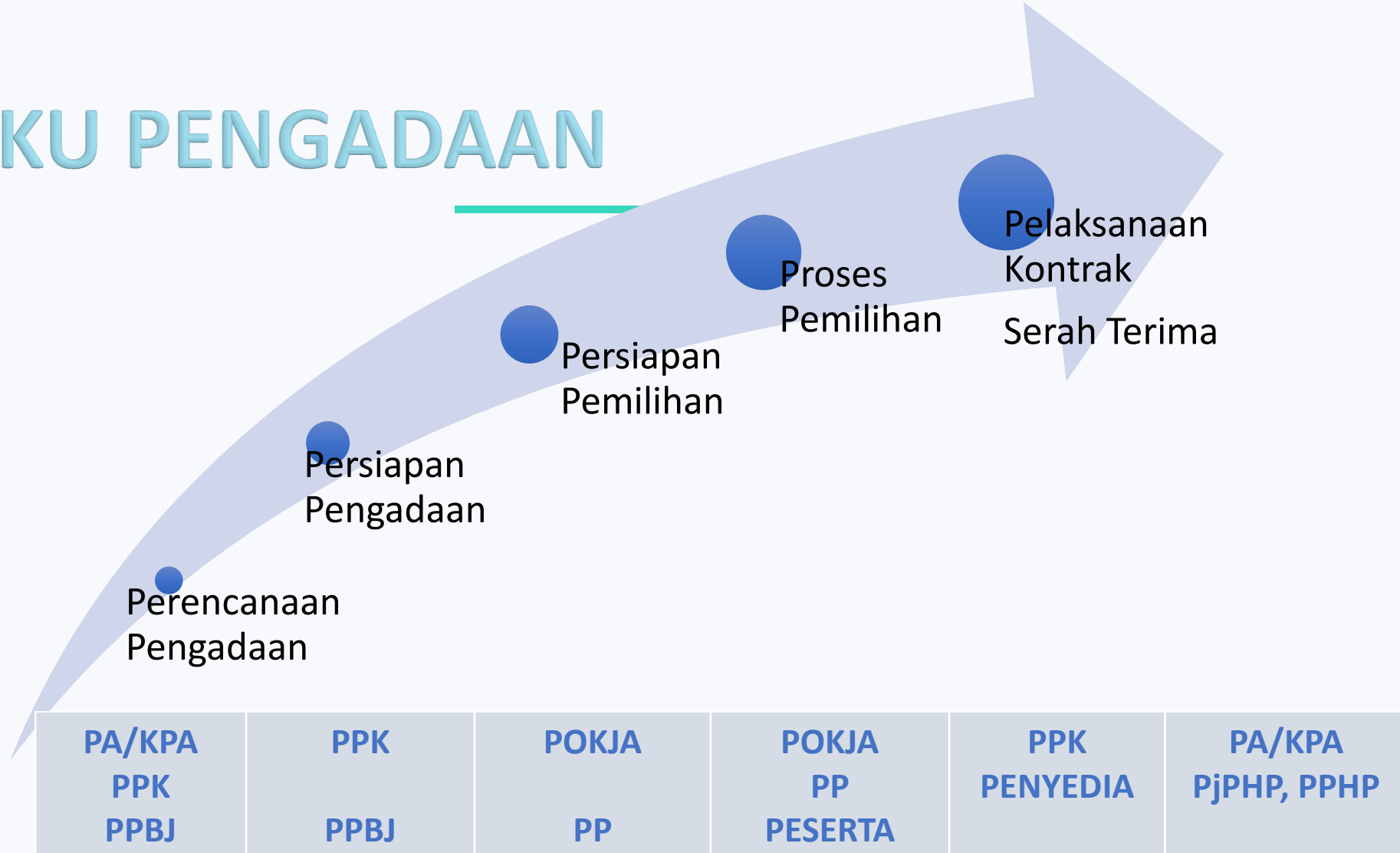
↑  
Perlem 17/2018 : Daftar Hitam  
Perlem 18/2018 : Layanan Penyelesaian Sengketa



# GARIS BESAR PELAKSANAAN PBJ



# PELAKU PENGADAAN



PPTK ??



# 12

## PENGATURAN BARU

---

# 01 TUJUAN PENGADAAN



Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia



Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri



Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah



Meningkatkan peran pelaku usaha nasional



Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan Barang/Jasa hasil penelitian



Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif



Mendorong pemerataan ekonomi



Mendorong Pengadaan Berkelanjutan

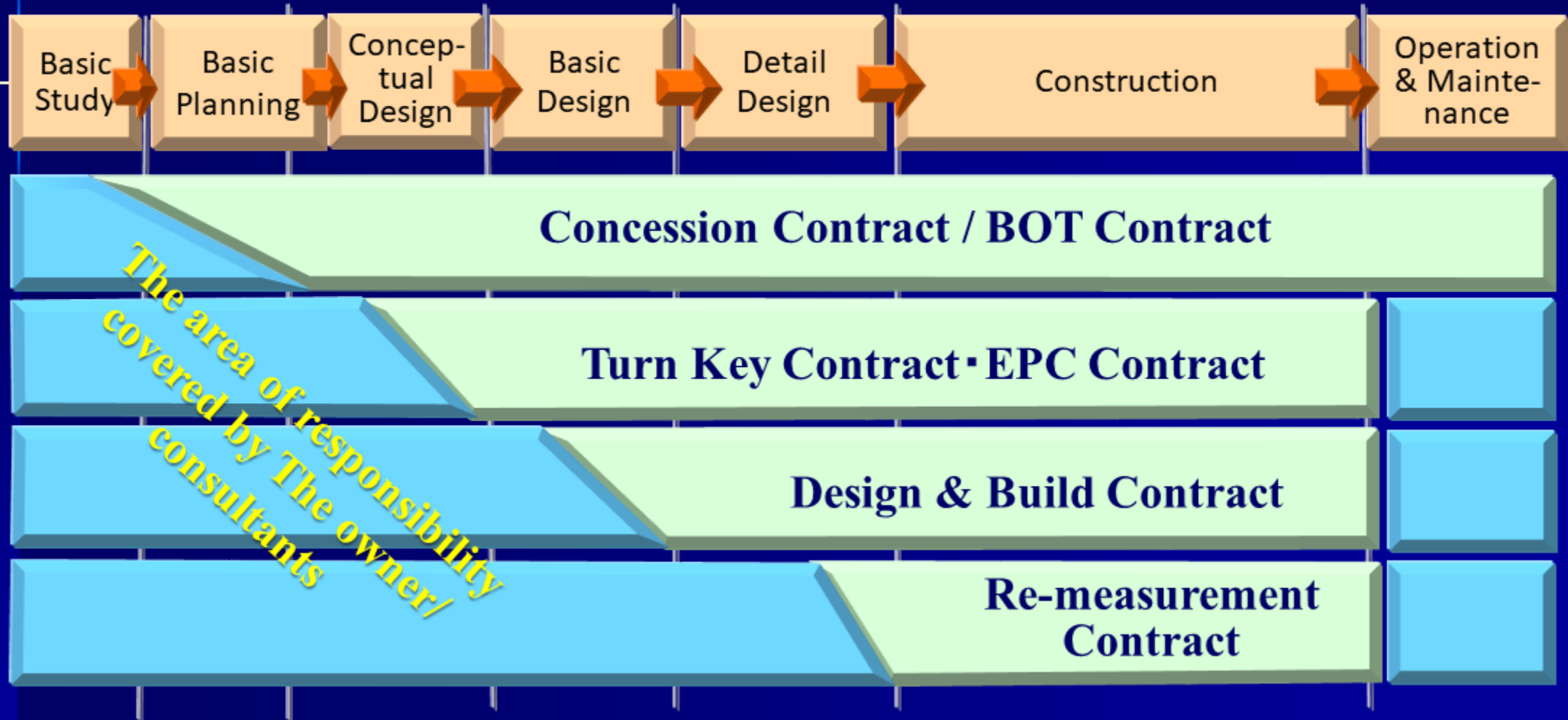
## 02 PEKERJAAN TERINTEGRASI



Pekerjaan Terintegrasi mencakup seluruh/sebagian jenis pengadaan

1. Pekerjaan Design and Build
2. Pekerjaan IT Solution
3. Pekerjaan EPC
4. Pekerjaan Pembangunan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan
5. dll

# Project Execution Schemes and Types of Contract



Sumber :

FIDIC Conditions of Contract (Rainbow Forms)

Seminar on Contract Administration Course for Construction Projects in Asia

## 03 PERENCANAAN PENGADAAN

### SUMBER DANA APBN

Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Renja K/L setelah penetapan Pagu Indikatif.

### SUMBER DANA APBD

Perencanaan pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses proses penyusunan RKA Perangkat Daerah setelah nota kesepakatan KUA-PPAS

Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:

- penyusunan spesifikasi teknis/KAK
- penyusunan perkiraan biaya/RAB
- pemaketan Pengadaan Barang/Jasa
- Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dan
- penyusunan biaya pendukung





Ekonomi &gt; Makro

## Sri Mulyani: Anda Tidak Bisa Merencanakan, Mengapa Saya Harus Kasih Anggaran?

Rabu, 21 Februari 2018 | 12:20 WIB



## 04 AGEN PENGADAAN

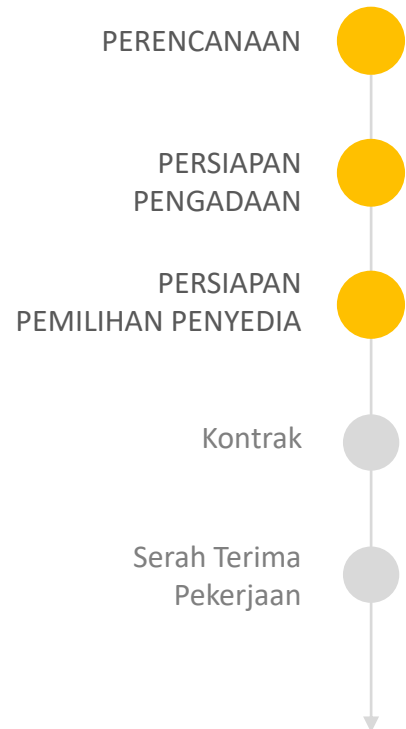


UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang dipercayakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Agen Pengadaan dapat berupa :

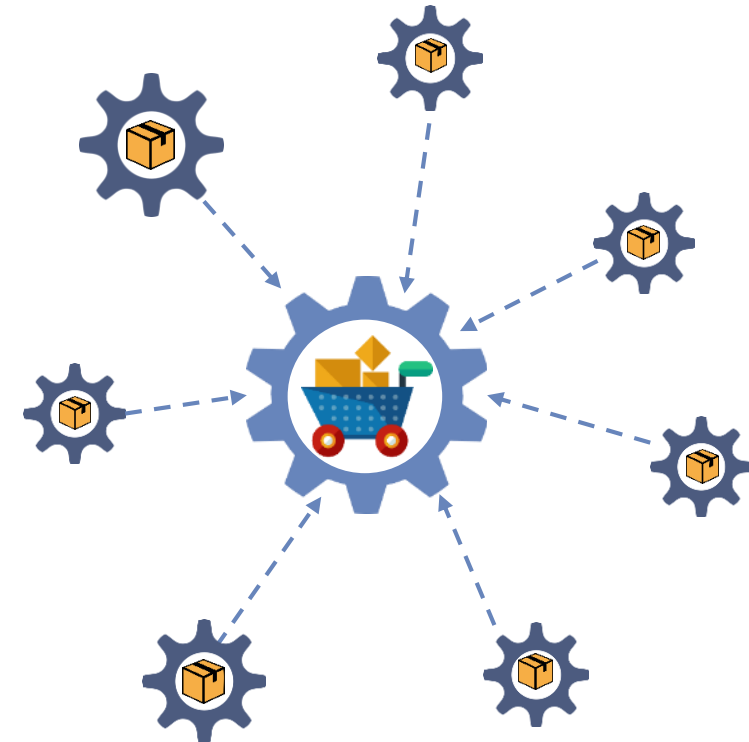
- UKPBJ pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah lain; atau
- Pelaku Usaha (Badan Usaha dan Perorangan)

# 05 KONSOLIDASI PENGADAAN



strategi pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan Barang/Jasa sejenis

**DILAKSANAKAN OLEH**  
PA/KPA/PPK/UKPBJ





---

	Konsolidasi Tingkat I	Konsolidasi Tingkat II	Konsolidasi Tingkat III
Pelaksana	PA/KPA	PPK	UKPBJ
Tahap	Perencanaan Pengadaan	Persiapan Pengadaan	Persiapan Pemilihan

## 06 SWAKELOLA



### TIPE I

Direncanakan,  
dilaksanakan dan  
diawasi oleh **K/L/PD  
PENANGGUNG  
JAWAB ANGGARAN**



### TIPE II

Direncanakan dan  
diawasi oleh  
K/L/PD penanggung  
jawab anggaran dan  
dilaksanakan oleh  
**K/L/PD PELAKSANA  
SWAKELOLA**



### TIPE III

Direncanakan dan diawasi oleh  
K/L/PD penanggungjawab  
anggaran dan dilaksanakan  
oleh **ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN**



### TIPE IV

Direncanakan oleh K/L/PD  
penanggungjawab anggaran  
dan/atau berdasarkan usulan  
**KELOMPOK MASYARAKAT** dan  
dilaksanakan serta diawasi oleh  
**KELOMPOK MASYARAKAT**

## 07 REPEAT ORDER

---



Penunjukan Penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan berulang (*Repeat Order*) melalui proses Penunjukan Langsung

Permintaan berulang dilakukan paling banyak 2 kali

## 08 E-REVERSE AUCTION

### MERUPAKAN

Metode penawaran harga secara berulang

### DAPAT DIGUNAKAN :

- a. pada tender cepat;
- b. sebagai tindak lanjut tender yang hanya terdapat 2 penawaran;



PENGATURAN BARU

# 09 PENGECUALIAN

---

21



PENGADAAN  
BARANG/JASA PADA  
BADAN LAYANAN UMUM



PENGADAAN  
BARANG/JASA YANG  
DILAKSANAKAN  
BERDASARKAN TARIF  
YANG DIPUBLIKASIKAN  
SECARA LUAS



PENGADAAN  
BARANG/JASA YANG  
DILAKSANAKAN SESUAI  
DENGAN PRAKTIK BISNIS  
YANG SUDAH MAPAN



SUDAH DIATUR DALAM  
PERATURAN  
PERUNDANG-  
UNDANGAN LAINNYA

# 10 PENELITIAN

## PELAKSANA PENELITIAN

- Individu/kumpulan individu
- Kementerian/Lembaga/  
Perangkat Daerah
- Perguruan Tinggi
- Organisasi Kemasyarakatan
- Badan usaha

## PEMILIHAN PELAKSANA PENELITIAN

- Kompetisi
- Penugasan

## KONTRAK PENELITIAN BERBASIS OUTPUT



# 11 E-MARKETPLACE

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah

Jenis Katalog Elektronik:

- Katalog Nasional
- Katalog Sektoral
- Katalog Lokal



# 12 LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA

Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS)  
memberikan pendapat hukum dan  
alternatif penyelesaian sengketa kontrak.

Layanan Penyelesaian Sengketa  
diselenggarakan oleh LKPP





# 19

## PERUBAHAN PENGATURAN

---

# PERUBAHAN PENGATURAN

## 01 TUGAS PPHP/PJPHP

26

### PERPRES 54/2010

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebelum serah terima dari Penyedia ke PPK;
- b. menerima hasil pekerjaan; dan
- c. membuat dan menandatangani BAST.



### PERPRES 16/2018

melakukan pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan sebelum diserahkan oleh PPK kepada PA/KPA

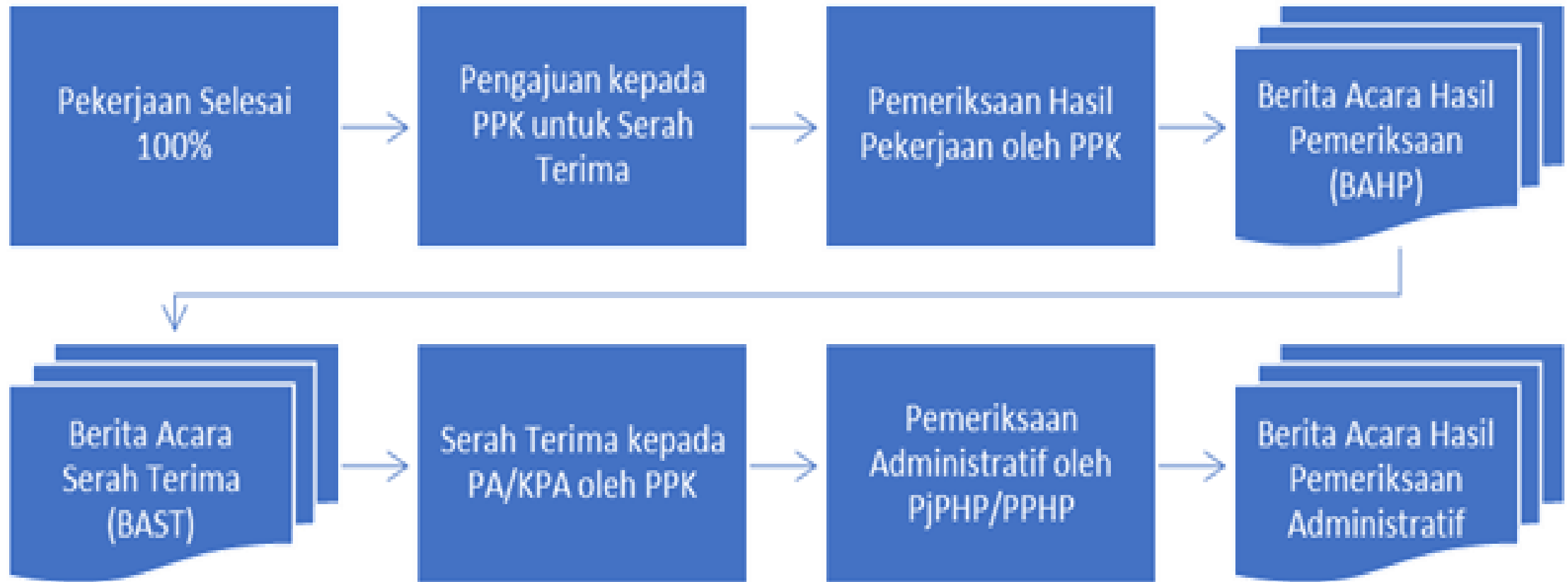
### PjPHP

Untuk nilai sampai dengan Rp200 Juta

### PPHP

Untuk nilai di atas Rp200 Juta

# Alur Serah Terima Hasil Pekerjaan



## 02 PERSYARATAN PENYEDIA



### PERPRES 54/2010

Persyaratan Penyedia dirumuskan secara mendetail



### PERPRES 16/2018

Persyaratan Penyedia dirumuskan secara sederhana

Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditambahkan tanggung jawab Penyedia :

- a. pelaksanaan kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyerahan.

## 03 PENYEBUTAN MEREK

### PERPRES 54/2010

Penyebutan merek/produk tertentu untuk :

- a. suku cadang
- b. Barang/jasa pada Tender Cepat

### PERPRES 16/2018

Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:

- a. komponen barang/jasa;
- b. suku cadang;
- c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
- d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
- e. barang/jasa pada Tender Cepat.



## 04 KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Kewajiban Penggunaan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri :

PERPRES 54/2010

**TKDN + BMP > 40%**

**DAN**

**paling sedikit 2 Produk mempunyai TKDN <25%**

PERPRES 16/2018

**TKDN + BMP > 40%**

~~**paling sedikit 2 Produk mempunyai TKDN <25%**~~



# 05 HARGA PERKIRAAN SENDIRI

## PERPRES 54/2010

HPS dikecualikan untuk :

- Kontes/Sayembara
- Pengadaan Langsung dengan Bukti Pembelian

Sumber informasi untuk penyusunan HPS diatur secara detail



## PERPRES 16/2018

HPS dikecualikan untuk :

- Pengadaan sampai dengan nilai Rp10.000.000
- Pengadaan melalui E-Purchasing
- Tender Pekerjaan Terintegrasi

Sumber informasi untuk penyusunan HPS tidak diatur lagi, tetapi disesuaikan dengan *best practice*

# 06 JAMINAN PENAWARAN & SANGGAH BANDING

## PERPRES 54/2010

Tidak diberlakukan  
Dalam hal e-tendering  
(PERPRES 4/2015)



## PERPRES 16/2018

### JAMINAN PENAWARAN

- Jaminan Penawaran Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pengadaan di atas Rp10 Miliar
- Nilai jaminan sebesar 1% -3% HPS

### JAMINAN SANGGAH BANDING

- Jaminan Sanggah Banding Untuk Pekerjaan Konstruksi
- Nilai Jaminan sebesar 1% HPS



# PERUBAHAN PENGATURAN 07 METODE PEMILIHAN PENYEDIA

33

## PERPRES 54/2010

	BARANG	PEKERJAAN KONSTRUKSI	JASA LAINNYA	JASA KONSULTANSI
LELANG/SELEKSI UMUM	√	√	√	√
LELANG TERBATAS	√	√	-	-
LELANG/SELEKSI SEDERHANA	√	-	√	√
PEMILIHAN LANGSUNG	-	√	-	-
PENUNJUKAN LANGSUNG	√	√	√	√
PENGADAAN LANGSUNG	√	√	√	√
KONTES	√	-	-	-
SAYEMBARA	-	-	√	√
E-PURCHASING	√	√	√	√



## PERPRES 16/2018

BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

E-PURCHASING

PENGADAAN LANGSUNG

PENUNJUKAN LANGSUNG

TENDER

TENDER CEPAT

JASA KONSULTANSI

SELEKSI

PENGADAAN LANGSUNG

PENUNJUKAN LANGSUNG

# PERUBAHAN PENGATURAN

## 08 JENIS KONTRAK

34

### PERPRES 54/2010

#### PENGADAAN BARANG/JASA

Dibagi dalam :

- Kontrak berdasarkan cara pembayaran (4 jenis);
- Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran (2 jenis);
- Kontrak berdasarkan sumber pendanaan (3 jenis); dan
- Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan (2 jenis).

Tidak ada perbedaan antara barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan jasa konsultasi



### PERPRES 16/2018

#### PENGADAAN BARANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA

- Lumsum
- Harga Satuan
- Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
- Terima Jadi (*Turnkey*)
- Kontrak Payung

#### PENGADAAN JASA KONSULTANSI

- Lumsum
- Waktu Penugasan
- Kontrak Payung

# 09 KONTRAK TAHUN JAMAK

TAHUN ANGGARAN 1	TAHUN ANGGARAN 2	TAHUN ANGGARAN 3
>12 bulan		
>12 bulan		
<12 bulan		
12 bulan	12 bulan	12 bulan

## PERPRES 54/2010

Pelaksanaan pekerjaan untuk masa lebih dari 1 Tahun Anggaran atas beban anggaran

## PERPRES 16/2018

- Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 Tahun Anggaran
- pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 Tahun Anggaran dan paling lama 3 Tahun Anggaran.

# 10 PENGADAAN LANGSUNG JASA KONSULTANSI

## PERPRES 54/2010

Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000

## PERPRES 16/2018

Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000



MAKS 50 JUTA



MAKS 100 JUTA



# 11 PEMESANAN E-PURCHASING

## PERPRES 54/2010

Dilakukan Oleh  
PPK/Pejabat  
Pengadaan/Petugas  
Yang Ditunjuk Tanpa  
Batas Nilai



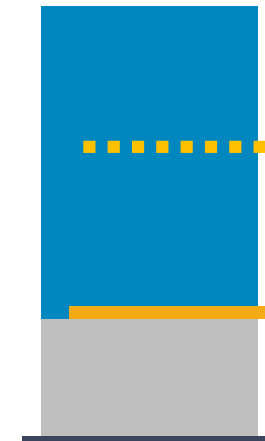
## PERPRES 16/2018

Pembagian Kewenangan  
Melakukan E-purchasing  
Berdasarkan Nilai

PEJABAT PENGADAAN  
MAKS 200 JUTA



PPK  
TIDAK DIBATASI  
 $\infty$



PERSETUJUAN PA  
 $\geq 100$  MILIAR



Batas Nilai

# 12 UANG MUKA UNTUK KONTRAK TAHUN JAMAK

## PERPRES 54/2010

20%

dari Kontrak  
tahun pertama

ATAU

15%

dari nilai  
Kontrak



## PERPRES 16/2018

PALING TINGGI

15%

dari Nilai  
Kontrak

# 13 PERUBAHAN KONTRAK

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, berlaku untuk pekerjaan dengan kontrak

PERPRES 54/2010

~~LUMSUM~~

HARGA SATUAN

GABUNGAN LUMSUM  
DAN HARGA SATUAN

PERPRES 16/2018

SEMUA JENIS KONTRAK



# 14 PENYESUAIAN HARGA

## PERPRES 54/2010

LEBIH DARI 12 BULAN

MULAI BULAN KE 13

Diberlakukan Pada Kontrak  
Tahun Jamak Yang  
Masa Pelaksanaannya

Pemberlakuan  
Penyesuaian Harga

## PERPRES 16/2018

LEBIH DARI 18 BULAN

MULAI BULAN KE 13





PERUBAHAN PENGATURAN  
PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA  
**15 PENANGANAN KEADAAN DARURAT**

---

41

### PERPRES 54/2010

Belum diatur secara khusus, Pengadaan barang/jasa dalam kondisi darurat sebagai salah satu kriteria penunjukan langsung

### PERPRES 16/2018

Diatur dalam satu pasal tersendiri sebagai bagian dari pengadaan dalam keadaan khusus



# 16 TENDER/SELEKSI INTERNASIONAL

Tender/Seleksi Internasional dapat dilaksanakan dalam hal:

## PEKERJAAN KONSTRUKSI

**PERPRES 54/2010**

> Rp 100 Miliar



**PERPRES 16/2018**

> Rp 1 Trilyun

## JASA KONSULTANSI

**PERPRES 54/2010**

> Rp 10 Miliar



**PERPRES 16/2018**

> Rp 25 Miliar

## BARANG

**PERPRES 54/2010**

> Rp 20 Miliar



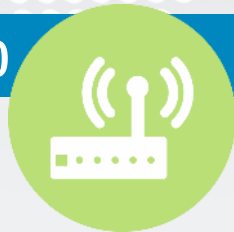
**PERPRES 16/2018**

> Rp 50 Miliar

## JASA LAINNYA

**PERPRES 54/2010**

> Rp 20 Miliar



**PERPRES 16/2018**

> Rp 50 Miliar

Atau tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut

# PERUBAHAN PENGATURAN

## 17 UKPBJ

43



**PERPRES 16/2018**

**PERPRES 54/2010**

ULP memiliki Tugas  
Melaksanakan  
Pemilihan Penyedia  
Barang /Jasa



### MEMILIKI FUNGSI :

- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
- Pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik
- Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
- Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

Tugas pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik dapat dilaksanakan oleh unit kerja terpisah.

PERUBAHAN PENGATURAN

# 18 PELAYANAN HUKUM

## BAGI PELAKU PENGADAAN

---

44



### PERPRES 54/2010

Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidikan

### PERPRES 16/2018

Pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.

# 19 PENCANTUMAN DALAM DAFTAR HITAM

## PERPRES 54/2010

K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional. Pengenaan Sanksi Daftar Hitam selama 2 tahun

## PERPRES 16/2018

PA/KPA menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik, untuk ditayangkan dalam Daftar Hitam Nasional.

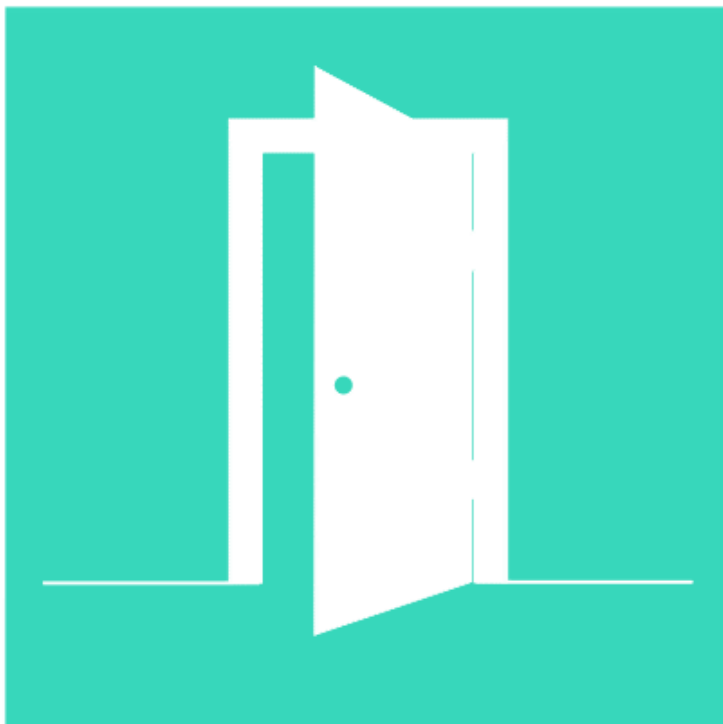
Tingkatan Pengenaan Sanksi Daftar Hitam:

- 1 Tahun
- 2 Tahun



# PENUTUP

---



## PEMBERLAKUAN PERPRES

- Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

## TRANSISI

- Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak.





**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Akhir Presentasi

# TERIMA KASIH